



**PEMERINTAH KOTA SERANG
PROPINSI BANTEN**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2024-2026



**PEMERINTAH KOTA SERANG
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG
2023**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan. Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan, penyusunan RENSTRA ini berlandaskan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Dearah Kota Serang Tahun 2024-2026. Sementara proses penyusunannya dilakukan melalui tahapan dan tata cara dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026 ini dirumuskan dengan tahapan, tata cara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota serang yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Dearah Kota Serang Tahun 2024-2026.

Disamping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstra ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 3 (tiga) tahunan Sekretariat Daerah Kota serang sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud Kepemerintahan yang baik. Diharapkan RENSTRA Sekretariat Daerah kota Serang Tahun 2024–2026 ini menjadikan arah proses dan pelayanan Sekretariat Daerah kota serang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara teratur .

Akhir kata semoga dokumen RENSTRA ini bermanfaat demi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kota Serang hingga tahun 2026 ke depan.


SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG
Drs. H. NANANG SAEFUDIN, M.Si
NIP.19670802 198603 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BABI PENDAHULUAN.....	1
1.1 LatarBelakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Renstra	9
BABII GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	11
2.1 Tugas, Fungsidan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Serang.....	11
2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Serang	23
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Serang..	27
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Serang	33
3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Daerah	34
3.3 Telaahan Renstra Sekretariat Daerah ProvinsiBanten	43
3.4 Telaahan RTRW Kota Serang.....	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	58
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	61
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	68
BABVIII PENUTUP.....	70



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Berdasarkan Eselon	21
Tabel 2.2	Data Kepegawaian PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	22
Tabel 2.3	Data Kepegawaian PNS Menurut Tingkat Kepangkatan, Golongan dan Ruang	22
Tabel 2.4	Data Kepegawaian PNS Jenis Kelamin	22
Tabel 2.5	Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana	23
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2019-2023	28
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2019-2023	29
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	33
Tabel 3.2	Tujuan RPD Kota Serang	37
Tabel 3.3	Isu-isu strategis OPD.....	46
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2004-2026	48
Tabel 4.2	Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Kota Serang	50
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program	60
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	67
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Serang Tahun 2024-2026	69
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah Kota Serang Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra PD	4
Gambar 1.2	Keterkaitan Renstra Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026 dengan RPD Kota Serang Tahun 2024-2026.....	5
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Serang.....	19
Gambar 2.2	Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli.....	21
Gambar 3.1	Hubungan antar Arah Pembangunan RPJPD dan Tujuan RPD Kota Serang Tahun 2024-2026	36
Gambar 3.2	Hubungan antar Arah Pembangunan RPJPD dan Tujuan RPD Kota Serang Tahun 2024-2026	36



PEMERINTAH KOTA SERANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jendral Sudirman Komplek Kota Serang Baru
Telp : (0254) 210538, 201117, Fax. (0254) 202810
Serang - Banten

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG NOMOR : / 010 -SETDA/2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2024-2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah Kota Serang menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Sekretaris Daerah Kota Serang perlu menetapkan keputusan tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2024-2028.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
9. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
19. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2008-2025 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Walikota Serang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Serang
21. Keputusan Walikota Serang Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang tahun 2024-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Serang ini.
- KEDUA : Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian agar menjadikan Rencana Strategis ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.
- KETIGA : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Serang

Pada Tanggal : 05 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG



[Handwritten Signature]
Des. H. NANANG SAEFUDIN, M.SI

NIP.196708021986031003



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan suatu sistem yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik spesifik organisasi, untuk itu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat diperlukan adanya perencanaan strategis pemerintah daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah. Perencanaan strategis juga merupakan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai instrumen yang akan membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan pembangunan menengah Perangkat Daerah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Sebagaimana Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru bahwa Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, Pemerintah Daerah diharuskan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Perangkat Daerah menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 yang pelaksanaannya dilakukan secara simultan dan bersamaan dengan Penyusunan RPD Kota Serang Tahun 2024-2026, sehingga terdapat keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan menengah



daerah dengan perencanaan pembangunan menengah Perangkat Daerah.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Serang ini disusun dan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026 dalam satuan yang lebih spesifik guna mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan Kota Serang.

Sekretariat Daerah Kota Serang merupakan Perangkat Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Kota Serang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota. Sekretariat Daerah Kota Serang merupakan salah satu perangkat daerah guna menyelenggarakan unsur pendukung urusan pemerintahan di Kota Serang.

Keberadaan Sekretariat Daerah Kota Serang yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan daerah, terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Serang sebagai pelaksana unsur pendukung urusan pemerintahan. Untuk mewujudkan harapan tersebut tentunya banyak hal yang mesti didorong dan ditingkatkan mulai dari pembenahan di internal dan juga di eksternal organisasi.

Berangkat dari kondisi tersebut diatas dan dalam upaya pembenahan dalam penyiapan lembaga yang profesional sebagaimana tujuan dan sasaran Kota Serang Tahun 2024-2026, perlu dilakukan penjabaran tujuan dan sasaran daerah ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta perkiraan kemampuan pendanaan pembangunan dalam upaya ketercapaian target kinerja selama periode Renstra Sekretariat Daerah Kota Serang pada Tahun 2024-2026.



Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026 dilaksanakan berdasarkan proses dan pendekatan sebagai berikut:

1. Proses Teknokratik.

Proses teknokratik dalam penyusunan Renstra PD adalah proses perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana. Proses teknokratik ini menghasilkan Rancangan Teknokratik Renstra PD. Rancangan teknokratik Renstra Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026 dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan RPD Kota Serang Tahun 2024-2026. Oleh karena itu penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan selama 3 (tiga) tahun mendatang berfokus pada pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Serang Tahun 2024-2026 dan hasil evaluasi dari ketercapaian indikator kinerja unsur pendukung urusan pemerintahan pada tahun 2018-2023.

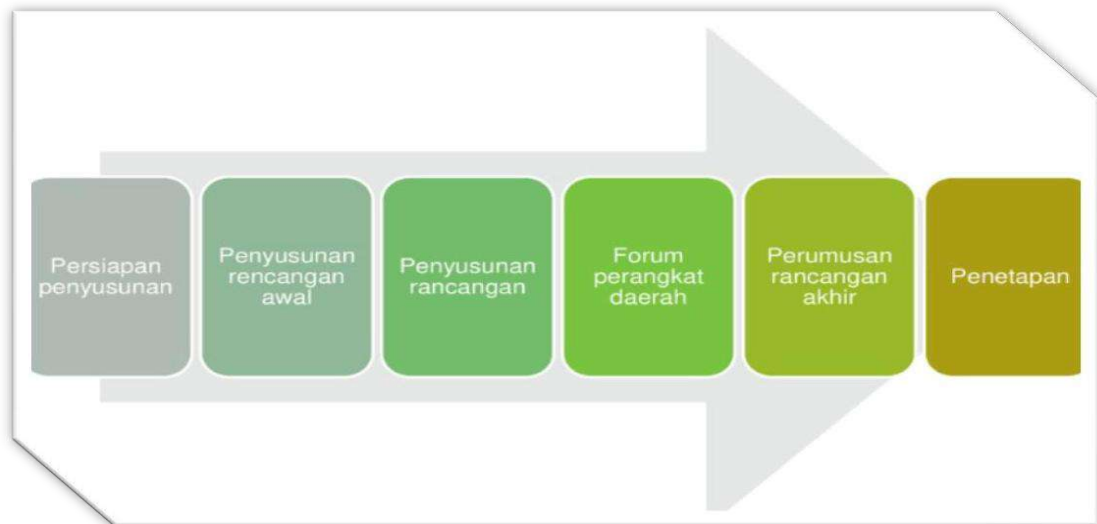
2. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), diantaranya melalui Forum Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Serang Kota Serang Tahun 2024-2026 dilakukan melalui tahapan yang ditunjukkan pada gambar 1.1. sebagai berikut:



Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra PD



Selanjutnya, keterkaitan Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan bahwa, penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Serang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Serang Tahun 2024-2026. Renstra tersebut selanjutnya akan dijabarkan secara tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) agar kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dianggarkan.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Serang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Serang. Penetapan Renstra dilakukan setelah Rancangan Akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026 mempedomani dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan.



Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra
Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026
dengan RPD Kota Serang Tahun 2024-2026



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Renstra Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026 ini disusun dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang



- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1538);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru Berakhir pada Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2008 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 2);



18. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
20. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 173);
21. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 293).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026 ini dimaksudkan untuk membuat rencana pembangunan jangka menengah pada Sekretariat Daerah Kota Serang sebagai penjabaran dari RPD Kota Serang Tahun 2024-2026 sesuai dengan estimasi kebutuhan sampai dengan tiga tahun yang akan datang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026 adalah:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta prioritas pembangunan Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Serang dan perencanaan anggaran;
3. Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah terpadu antara Pemerintah Kota Serang dengan Sekretariat Daerah Kota Serang.



1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026, disusun melalui sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan;

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta kelompok sasaran layanan yang terkait dengan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Serang;

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah Kota Serang, telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan RPD, serta Penentuan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Serang;

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta rumusan cascading Sekretariat Daerah Kota Serang;

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang Strategi dan Kebijakan pelaksanaan kinerja pelayanan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026;

BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Mengemukakan Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan, beserta kinerja, indikator, target,



dan pagu indikatifnya;

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Mengemukakan penentuan target keberhasilan pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Serang yang akan di capai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Serang Tahun 2024-2026;

BAB VIII Penutup

Berisi ringkasan Rencana Strategis serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang. Sekretariat Daerah Kota Serang merupakan Perangkat Daerah Kota Serang yang menyelenggarakan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tersebut, ditetapkan Peraturan Walikota Serang Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Serang. Didalam peraturan Walikota tersebut, menyebutkan bahwa "Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif".

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Serang sesuai ketentuan Peraturan Walikota Serang Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Sekretariat Daerah, terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Bagian Pemerintahan, membawahkan Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan Sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Hukum, membawahkan Sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.



- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik; dan;
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan :
 1. Bagian Umum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 2. Bagian Organisasi, membawahkan Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Protokol; dan
 - c) Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
Jabatan fungsional dalam kelompok jabatan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif



terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Sekretariat Daerah Kota Serang mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :

- a. Bagian Pemerintahan, membawahkan Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bagian Hukum, membawahkan Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :

- a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan Sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa;
 - 2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik; dan;
 - 3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

4. Asisten Administrasi Umum, membawahkan :

- a. Bagian Umum, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.



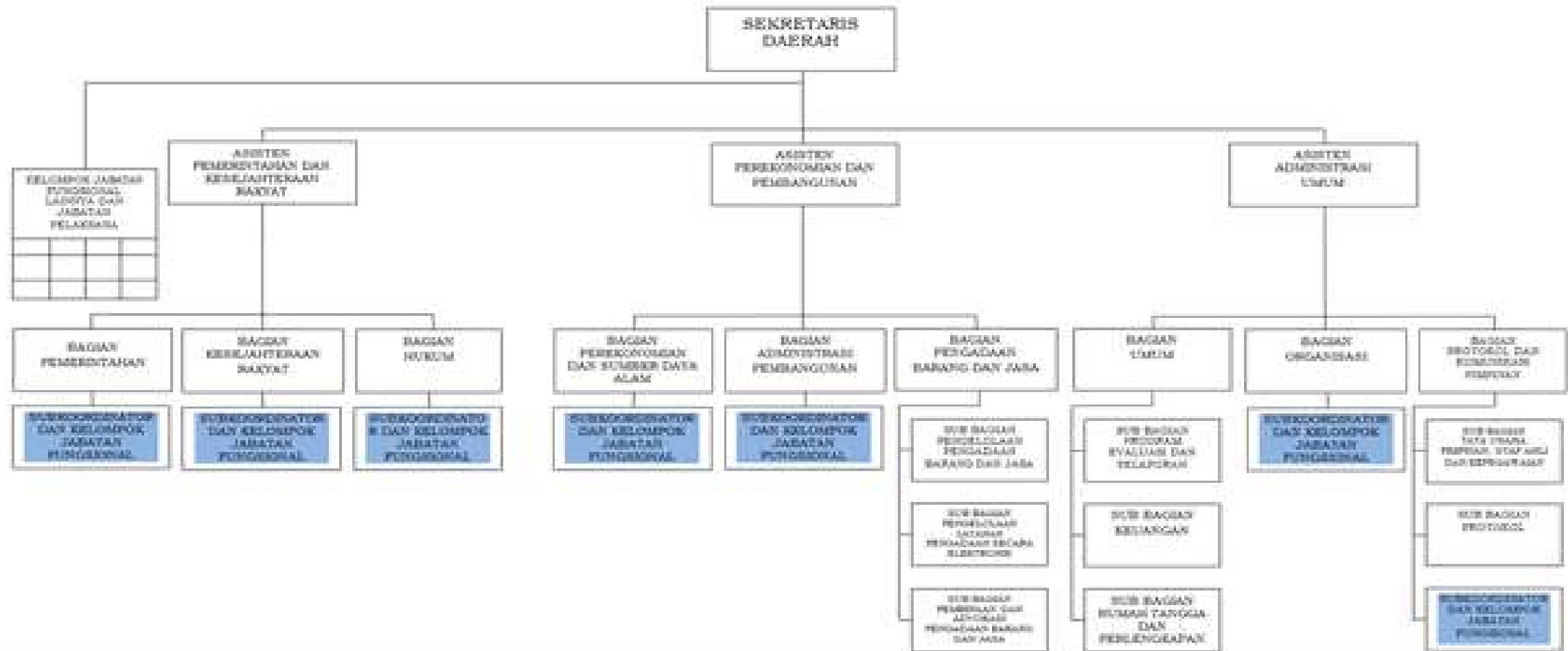
- 4) Bagian Organisasi, membawahkan Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Protokol; dan
 - 3) Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 4) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Serang berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 108 Tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut:



STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG TIPOLOGI B

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Serang





Selain itu terdapat pula Staf Ahli Walikota merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021. Staf Ahli Walikota mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota dalam bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan, serta bidang Ekonomi dan Keuangan. Adapun fungsi Staf Ahli adalah sebagai berikut :

1. Staf Walikota Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Setda

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kajian dan telaahan bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. penyelenggaraan konsultasi bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- c. penyusunan rekomendasi dan pertimbangan teknis tentang Pemerintahan, Hukum dan Politik; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Walikota Bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kajian dan telaahan bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- b. penyelenggaraan konsultasi bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- c. penyusunan rekomendasi dan pertimbangan teknis tentang bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

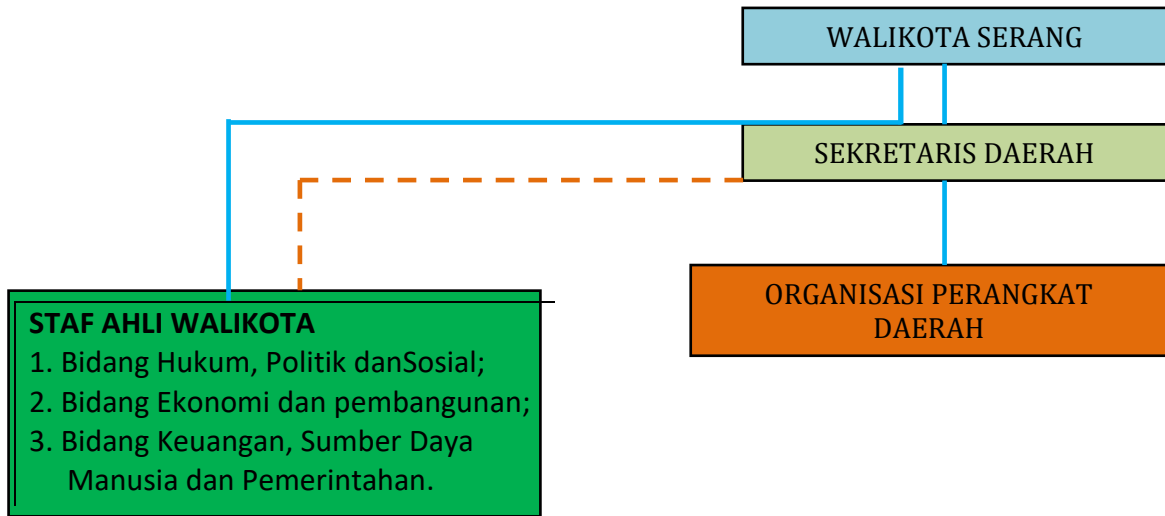
- a. penyusunan kajian dan telaahan bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya



- Manusia;
- b. penyelenggaraan konsultasi bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- c. penyusunan rekomendasi dan pertimbangan teknis tentang bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota

Gambar 2.2

Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli adalah sebagaimana dimaksud



Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Serang

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Serang didukung oleh SDM sebanyak 539 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Data Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	Eselon II	7
2	Eselon III	9
3	Eselon IV	27
4	Pejabat Fungsional	10
5	Pelaksana	13
Jumlah		66

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2023



Tabel 2.2
Data Kepegawaian
PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	2	3
1	Strata 3	1
2	Strata 2	30
3	Strata 1	34
4	SLTA	1
Jumlah		66

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2023

Tabel 2.3
Data Kepegawaian PNS Menurut Tingkat
Kepangkatan, Golongan dan Ruang

NO	KEPANGKATAN	GOL	JUMLAH
1	2	3	4
1	Pembina Utama Madya	IV/d	1
2	Pembina Utama Muda	IV/c	4
3	Pembina Tingkat I	IV/b	8
4	Pembina	IV/a	12
5	Penata Tingkat I	III/d	16
6	Penata	III/c	9
7	Penata Muda Tingkat I	III/b	4
8	Penata Muda	III/a	12
Jumlah			66

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2023

Tabel 2.4
Data Kepegawaian PNS Jenis Kelamin

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Laki-laki	45
2	Perempuan	21
Jumlah		66

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2023



2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Serang dapat berjalan baik apabila didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan jumlahnya cukup, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Sarana penting dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang dimiliki Sekretariat Daerah Kota Serang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana

NO	JENIS ASET	NILAI	KONDISI (B/KB/R)
1	2	3	4
1	Kendaraan Roda Empat	3.254.908.750	B
2	Kendaraan Roda Dua	2.457.989.500	B
3	Sepeda	157.090.000	B
4	Mesin Hitung	14.520.000,-	B
5	TV Monitor	96.441.380	B
6	AC	342.083.330	B
7	Kipas Angin	6.081.980	B
8	Vacum Cleaner	2.608.155,-	B
9	Generator (Genzet)	464.004.500	B
10	Lemari	171.094.381	B
11	Brangkas	157.392.500	B
12	Filing Kabinet	12.100.000,-	B
13	Karpet / Permadani	433.845.239	B
14	Komputer / PC	85.325.000	B
15	Note Book	258.335.000	B
16	Printer	140.822.270	B
17	Meja Kerja	116.250.674	B
18	Meja Rapat	65,908.700	B
19	Meja Makan	84.672.000	B
20	Kursi Kerja	146.010.000	B
21	Kursi Rapat	97.867,75	B
22	Sofa	229.561.300	B
23	Rak TV	4.646.400,-	B
24	Kompom Gas	51.976.000	B
25	Kulkas	1.864.005	B

**RENCANA STRATGEIS TAHUN 2024-2026**

26	Gordyn	420.842.571	B
27	Camera Shooting	171.350.950	B
28	Handycam	19.250.000	B
29	Infokus	49.364.866	B
30	Camera LSR	85.055.575	B
31	I-Pad	59.961.550,-	B
32	Telepon	29.324.800	B
33	Toa	4.000.000,-	B
34	Microphone	29.870.266	B
35	Buku	58.320.500	B
36	Buku Perundang- Undangan	28.480.570	B
37	Dispenser	57.781.000	B
38	UPS (Stabilizer)	30.397.500	B
39	Kendaraan roda tiga	56.555.040	B
40	Meja Kerja Eselon I/Wakil Gubernur/Bupati/Walikota	4,719,000	B
41	Lemari Pakaian	49,250,000	B
42	Meja Biro	3,350,000	B
43	Lukisan Lain-lain	1,300,000	B
44	Layar	16,341,869	B
45	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	3,700,000	B
46	Meja Komputer	6,600,000	B
47	Meja Tulis	5,868,500	B
48	Alat Hiasan	35,314,516	B
49	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	34,727,000	B
50	Alat Komunikasi Lain-lain	45,834,000	B
51	Alat Pendingin Lain-lain	8,954,000	B
52	Alat Penghancur Kertas	30,034,600	B
53	Alat Rumah Tangga Lain-lain	200,116,500	B
54	Bangunan Gedung Kantor Permanen	921,350,736	B
55	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain	7,941,005,750	B
56	Bel Listrik	1,504,380	B
57	Blender	1,600,000	B
58	Compact Disc. Player	2,250,000	B
59	Facsimile	7,750,000	B
60	Flashk	5,795,000	B
61	Gedung Garasi/Pool Permanen	115,046,000	B
62	Gerobak Dorong	9,680,000	B
63	Hard Disk	7,134,000	B
64	HT Dying	36,300,000	B

**RENCANA STRATGEIS TAHUN 2024-2026**

65	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	89,294,119	B
66	Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain	22,110,000	B
67	Jam Mekanis	42,225,000	B
68	Jeep	945,119,120	B
69	Kain Panel	27,435,540	B
70	Kendaraan Bermotor Angkutan Brg Lain-lain	1,016,548,920	B
71	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	776,509,784	B
72	Kipas Angin	2,110,000	B
73	Kitchen set	24,442,000	B
74	Laptop	645,006,160	B
75	Kursi Biasa	1,400,000	B
76	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	37,147,000	B
77	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	26,640,000	B
78	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	61,297,426	B
79	Meja Kerja Pejabat Eselon II	54,311,600	B
80	Meja Kerja Pejabat Lain lain	7,200,000	B
81	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	67,342,574	B
82	Meja Tulus	5,868,500	B
83	Mesin Absensi	16,748,759	B
84	Mesin Cuci	16,950,000	B
85	Mesin Gergaji	4,850,000	B
86	Mesin Ketik Listrik Portable	21,000,000	B
87	Mesin Pemetong Rumput	19,900,000	B
88	MEUBELAIR LAINNYA	125,933,000	B
89	Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)	680,950,000	B
90	Microphone	71,994,380	B
91	Microphone Floor Stand	4,036,060	B
92	Microphone/Wireless Mic	40,713,700	B
93	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	4,209,890,545	B
94	Mixer	31,686,492	B
95	Mobil Ambulance	225,620,000	B
96	Modem	10,799,000	B
97	Off Air TV Monitor	80,534,453	B
98	Papan Nama Instansi	11,057,650	B

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026**

99	Papan Visual	23,850,000	B
100	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	9,750,000	B
101	Peralatan Microwave FPU	4,875,000	B
102	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	4,950,000	B
103	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	43,073,789	B
104	Peralatan studio Visual Lain-lain	29,920,000	B
105	Personal Komputer	178,128,000	B
106	Personal Komputer Lain-lain	16,259,840	B
107	Pick Up	126,018,900	B
108	Pompa Air	56,327,226	B
109	Rak Besi/Metal	6,830,000	B
110	Rak Kayu	33,240,000	B
111	Recorder	5,609,678	B
112	Scanner	33,354,983	B
113	Software	406,250,000	B
114	Sound System	186,135,842	B
115	Staion wagon	1,077,845,000	B
116	Tangga Alumunium	5,500,000	B
117	Tangki Air	18,026,277	B
118	Television	29,550,000	B
119	Tempat PembuanganSampah Sementara Permanen	32,113,000	B
120	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	19,904,500	B
121	Tiang Keseimbangan	22,408,716	B
122	Treat Mill	49,560,000	B
123	Tugu Pembangunan Lain-lain	142,060,000	B
124	Tugu Peringatan Lain-lain	115,000,000	B
125	Tugu/Tanda Batas Administrasi Desa	104,190,000	B
126	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kelurahan	259,740,000	B
JUMLAH		25.408.114.419,-	

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Serang

Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

mempunyai Tugas membantu Walikota dan Wakil Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Perangkat Organisasi Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi staf yang membantu Walikota dalam menyusun kebijakan, pengkoordinasian, pemantau, evaluasi dan pembinaan administrasi terhadap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Depok. Sehingga penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam pelaksanaan urusan wajib oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Dinas dan Badan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tidak dapat diberlakukan pada Organisasi Perangkat Daerah mengingat tidak adanya urusan wajib yang dikelola oleh Perangkat Sekretariat Daerah Kota Serang

Berdasarkan tugas tersebut maka pencapaian kinerjanya dari tahun 2019-2023 dapat terlihat pada tabel sebagai berikut.



Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Serang
Tahun 2019-2023

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					REALISASI				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Laju inflasi	%	3.06	1.91	3	3	3	3,06	1,91	2.23	7.22	
2	Presentase Fasilitasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Capaian Implementasi Kebijakan Perekonomian	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Serang
Tahun 2019-2023

KORING	PROGRAM PROIRITAS	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
SEKRETARIAT DAERAH												
4	01	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DANKESEJAHTERAAN RAKYAT	17,876	17,080	16,273	17,587	18,287	17,876	17,080	14,475	11,530
4	01	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DANPEMBANGUNAN	1,151	1,619	2,785	3,148	3,796	1,151	1,619	2,622	3,086



2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran Sekretariat Daerah Kota Serang, diantaranya :

- a. Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Serang;
- b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Serang;
- c. Lembaga Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Insan Pers dan Media Masa cetak dan online

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Dalam upaya mendorong Sekretariat Daerah Kota Serang menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran dan tupoksinya di tengah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan secara baik, antara lain:

- 1) Kewenangan dan peran Sekretariat Daerah yang makin kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang bidang penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- 2) Semakin berkembangnya teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- 3) Tuntutan stakeholders akan produk bidang penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang berkualitas, transparan dan partisipatif
- 4) Kesiediaan perguruan tinggi/lembaga lain untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan pembangunan daerah, pendampingan, evaluasi dan perumusan kebijakan.

Tantangan

yang datang dari luar organisasi (Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi eksternal)



dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan yang perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah dalam 3 (tiga) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

- 1) Kebijakan nasional/peraturan perundang-undangan yang berubah secara cepat dan tidak segera ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya sehingga menyebabkan inkonsistensi penyusunan kebijakan pembangunan di daerah;
- 2) Belum optimalnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar Perangkat Daerah;
- 3) Masih belum optimalnya kapasitas dan komitmen Perangkat Daerah terhadap penyusunan kebijakan;
- 4) Belum optimalnya hasil penyusunan kebijakan karena masih terdapatnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh PD.
- 5) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.

Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.

Dalam upaya mendorong Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran dan tupoksinya di tengah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka beberapa peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan yang dapat dimanfaatkan secara baik, antara lain sebagai berikut:

- 1). Kewenangan dan peran Sekretariat Daerah yang makin kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang



bidang penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;

- 2). Semakin berkembangnya teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- 3). Tuntutan stakeholders akan produk bidang penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang berkualitas, transparan dan partisipatif
- 4). Kesiediaan perguruan tinggi/lembaga lain untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Serang

Sekretariat Daerah Kota Serang merupakan Lembaga Daerah Kota Serang yang menyelenggarakan unsur pendukung urusan pemerintah yang mempunyai tugas membantu Walikota dan Wakil Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Serang, masih ada beberapa permasalahan dalam unsur pendukung urusan pemerintah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Belum optimalnya nilai capaian rata-rata sikip perangkat daerah	Rendahnya capaian kinerja dan reformasi
2	Belum optimalnya kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah		
3	Belum optimalnya pengendalian inflasi daerah	Belum optimalnya implementasi Kebijakan kesejahteraan rakyat	Rendahnya pelaksanaan kebijakan, evaluasi capaian kinerja terkait kesejahteraan rakyat
		Belum optimalnya capaian reformasi hukum	Rendahnya fasilitasi penyusunan produk hukum
			Rendahnya fasilitasi bantuan hukum
		Belum optimalnya Pengendalian Pertumbuhan ekonomi	Rendahnya pengendalian dan evaluasi penyusunan program pembangunan



3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Daerah

Kota Serang merupakan salah satu daerah yang menyusun RPD untuk tahun 2024-2026. Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kota Serang tahun 2008-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun keempat serta isu strategis yang aktual. Visi pembangunan jangka panjang Kota Serang sampai tahun 2026 adalah

"Terdepan sebagai Pusat Pendidikan, Jasa dan Perdagangan menuju Kota Serang Smart 2025"

Kota Serang "Terdepan sebagai Pusat Pendidikan, Jasa dan Perdagangan dimaksudkan sebagai kota yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan kabupaten/kota lain khususnya di bidang pendidikan, jasa dan perdagangan. Keunggulan di bidang pendidikan di fokuskan pada pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren. Keunggulan di bidang jasa difokuskan pada pariwisata, maritim (pelabuhan), pemerintahan, dan perbankan. Keunggulan di bidang perdagangan difokuskan pada perdagangan skala regional (antar wilayah).

Secara lebih rinci makna dari visi Kota Serang 2008-2025 adalah : Pendidikan : Kondisi berfungsinya Kota Serang sebagai pusat pelayanan pendidikan di Provinsi Banten (Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Keagamaan skala Provinsi Banten).

Jasa : Kondisi berfungsinya Kota Serang sebagai pusat pelayanan jasa di Provinsi Banten (Jasa Keuangan/Perbankan, Pemerintahan Umum, Pariwisata, Kemaritiman skala Provinsi Banten).



Perdagangan : Kondisi berfungsinya Kota Serang sebagai pusat pelayanan perdagangan di Provinsi Banten (Perdagangan grosir skala Provinsi Banten).

Sejahtera : Kondisi terpenuhinya kebutuhan lahiriah (pangan, sandang, papan), kebutuhan batiniah (agama dan budaya), dan hak dasar masyarakat Kota Serang dalam seluruh aspek kehidupan (sosial, ekonomi, politik, hukum).

Maju : Kondisi Kota Serang yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (sehat dan cerdas), tingkat perekonomian daerah dan masyarakat yang sejajar dengan kota-kota maju di Indonesia.

Adil : Perwujudan kesetaraan hak dan kewajiban masyarakat Kota Serang dalam seluruh aspek kehidupan.

Religius : Kondisi Kota Serang yang dijiwai oleh norma agama dan nilai budaya sebagai landasan spritual dan moral dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terbentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya.

Tertib : Kondisi lingkungan Kota Serang yang asri, serasi, lestari, tentram dan tertib.

Dalam konteks keterpaduan pembangunan nasional dan provinsi, visi pembangunan Kota Serang tahun 2008-2025 merupakan wujud komitmen seluruh masyarakat Kota Serang untuk mendukung pencapaian visi pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025 "Banten yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa" dan visi pembangunan nasional tahun 2005- 2025 "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.



Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, disusunlah 5 (lima) Misi Pembangunan Jangka Panjang Kota Serang, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing;
3. Mewujudkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kota yang Berkualitas;
4. Mewujudkan Keserasian Tata Ruang, Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Yang Asri;
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih, Baik, Transparan Dan Berwibawa.

Pelaksanaan RPJPD ke-4 (empat), yang merupakan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan periode terakhir pada RPJPD Tahun Tahun 2008- 2025, Pemerintah Kota Serang yang berupaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Sehingga dirumuskan beberapa tujuan yang disusun berdasarkan tahapan di RPJPD tahap ke empat sebagai berikut:

Gambar 3.1
Hubungan antar Arah Pembangunan RPJPD dan Tujuan RPD Kota Serang Tahun 2024-2026





Penyusunan tujuan dan sasaran RPD Kota Serang mengacu pada RPJPD tahap keempat. Tujuan pembangunan Kota Serang dalam Rencana Pembangunan Daerah periode 2024–2026 diukur melalui indikator tujuan yang kemudian menjadi indikator makro daerah bagi pembangunan Kota Serang, sebagaimana berikut:

Tabel 3.2
Tujuan RPD Kota Serang

Tujuan	Indikator	Satuan	Realisasi	Target
			2023	2026
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	61,75	65.35(B)
Meningkatkan kualitas Hidup masyarakat kota Serang yang berdaya saing Dan berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,09	74,16
Mewujudkan daya saing perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,50	6,50
	Tingkat Kemiskinan	%	5,83	5,00
	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	%	NA	2,00

Berdasarkan pada tabel tersebut, maka penjelasan masing–masing tujuan dan ditetapkan sasaran pembangunan pada setiap tujuan yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu tanggung jawab dari kewenangan ekonomi, kewenangan administrasi, dan kewenangan politik untuk mengatur masalah-masalah sosial suatu daerah. Dari pengertian tersebut, terlihat tiga sektor utama dari kewenangan pemerintah yang kemudian



digunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Sementara itu, bank dunia lebih melihat tata kelola pemerintahan dari segi ekonomi. Dalam definisinya, dikatakan bahwa suatu negara telah mencapai tata kelola yang baik apabila telah berhasil menyelenggarakan sistem pengaturan pembangunan negara yang kuat, serta bertanggung jawab, dengan tetap beriringan dengan prinsip demokrasi dan prinsip pasar yang efisien. Di samping itu, dalam tata kelola pemerintah yang baik akan menghindari kesalahan dalam alokasi dana pembangunan.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Serang, maka dalam proses pembangunan harus melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila lembaga tidak didukung oleh partisipasi aktif oleh elemen masyarakat. Lalu, untuk mencapainya diperlukan kesadaran serta pengetahuan agar masyarakat dapat berpikir kritis mengenai kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan.

Dari sisi pemerintahan, good governance dapat dicapai apabila Pemerintah Kota Serang memperhatikan beberapa indikator pengukuran. Diantara indikator tersebut adalah:

a. Transparansi

Transparansi merupakan proses keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan. Harapannya, agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawasan. Memfasilitasi akses informasi menjadi faktor penting terciptanya transparansi ini.

b. Partisipasi

Partisipasi merujuk pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan. Masukan dari



berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu Pemerintah Kota Serang mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyusun perencanaan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup, tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan seperti forum konsultasi publik dan musrenbang perencanaan pembangunan daerah, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas didefinisikan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas peraturan yang telah dibuat. Proses ini juga sekaligus menguji seberapa kredibel suatu kebijakan tidak berpihak pada golongan tertentu. Akuntabilitas akan melewati beberapa proses pengujian tertentu. Proses yang terstruktur ini diharapkan akan mampu membaca celah-celah kekeliruan, seperti penyimpangan anggaran atau pelimpahan kekuasaan yang kurang tepat. Mekanisme akuntabilitas juga memberikan kesempatan kepada para pemangku kebijakan untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsensus dalam pelaksanaan tata kelola di bidang tertentu.

d. Koordinasi

Koordinasi adalah sebuah mekanisme yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan visi



dan misi pada masing-masing lembaga. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting, karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu.

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam satuan Negara merupakan suatu kebutuhan yang tak dapat dipisahkan. Implikasi dari perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik akan memberikan pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel sehingga memberikan suasana kemasyarakatan yang sejahtera, adil dan merata, berkualitas berkesinambungan, serta harmonis, aman dan tentram. Impian dari seluruh Pemerintah Daerah, tak terkecuali Pemerintah Kota Serang ini perlu diupayakan melalui berbagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat. Pemerintah Kota Serang juga memberikan peluang dan kesempatan kepada aparatur birokrasi dan masyarakat untuk mengembangkan ide, gagasan, dan kreativitas dalam rangka menciptakan inovasi yang bermanfaat untuk daerah, masyarakat, nusa, dan bangsa.

Tujuan ini memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kapasitas, kapabilitas, dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik ke masyarakat

2. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya memiliki arti memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang memberikan dampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia maupun pembangunan daerah.



Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Kota Serang seluruhnya mencakup pembangunan manusia, sebagai insan memberikan tekanan pada harkat, martabat, hak, dan kewajiban manusia yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia baik segi etika, estetika, maupun logika yang meliputi nilai-nilai rohaniah kepribadian dan kejuangan.

Profesionalisme dapat turut membentuk sikap dan perilaku serta kepribadian yang tangguh, sementara kepribadian yang tangguh merupakan prasyarat dalam membentuk profesionalisme. Minimal ada empat kebijakan pokok dalam upaya peningkatan SDM yaitu: Peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani dan rohani, serta kualitas kehidupannya seperti perumahan dan pemukiman yang sehat; Peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya; Peningkatan kualitas SDM yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK yang berwawasan lingkungan; serta Pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan peran hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan daerah yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM antara lain, pertama, adalah sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka



diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintah Kota Serang dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan IPTEK serta merata di seluruh pelosok tanah air serta pemerataan dan penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas.

Tujuan ini memiliki rumusan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya kualitas pembangunan gender

3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan

Daya saing daerah menurut Bank Indonesia (2018) didefinisikan sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Peningkatan daya saing perekonomian perlu dilakukan antara lain agar Pemerintah Kota Serang dapat meningkatkan investasi baik dalam negeri maupun asing.

Untuk meningkatkan daya saing perekonomian, salah satu upaya yang dapat menjadi alternatif kebijakan Kota Serang adalah mengembangkan perekonomian yang prorakyat. Hal ini dimaksudkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah serta perekonomian sektor informal yang mendapatkan kesempatan untuk dikembangkan sebagai salah satu upaya untuk mendongkrak perekonomian Kota Serang untuk segera pulih kembali dan untuk menghadapi isu resesi ekonomi yang akan terjadi pada tahun 2023. Kontribusi perekonomian Kota Serang terbesar adalah industri pengolahan. Sektor lain yang



mendominasi perekonomian Kota Serang adalah sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Untuk meningkatkan daya saing perekonomian maka dukungan sarana dan prasarana setiap kegiatan juga harus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang merata. Namun perlu digarisbawahi dalam melakukan pembangunan infrastruktur yang berkualitas juga perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya implementasi perekonomian hijau pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang merupakan suatu konsep pengembangan perekonomian dengan memperhatikan lingkungan agar dapat berjalan beriringandengan baik.

Tujuan ini memiliki rumusan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah;
- b. Meningkatnya pendapatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatnya fasilitas infrastuktur yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Apabila mengacu pada Tujuan dan Sasaran Kota Serang Tahun 2024-2026 maka Sekretariat Daerah Kota Serang mengacu pada tujuan ke 1 (Satu) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik .

3.3. Telaah Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Dalam konteks kesinambungan perencanaan, perlu sebuah rancangan perencanaan yang menjembatani perodesasi perencanaan jangka panjang dan jangka pendek untuk periode tahun 2023 sampai tahun 2026 setelah pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Sebagaimana diketahui, bahwa tahapan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Banten akan



berakhir pada tahun 2025 dan akan berakhir periode RPJMD Tahun 2017- 2022 Provinsi Banten pada tahun 2022.

Sebagai perangkat daerah Provinsi Banten, Sekretariat Daerah Kota Serang berkewajiban menyusun dokumen perencanaan periode tahun 2024-2026 dengan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang mengacu visi misi sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025 yakni:

“Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa”. Kedudukan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan Dokumen Akhir dari periode RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 yang berorientasi bahwa Provinsi Banten diharapkan telah mencapai kemajuan dan kemandirian memasuki kehidupan masyarakat modern, minimal sejajar dengan provinsi maju lainnya.

Berdasarkan hasil telaahan atas RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, Tujuan Daerah Tahun 2023-2026 yang perlu mendapat dukungan pencapaian berdasarkan bidang urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dalam upaya pencapaian Misi 4 RPJPD Provinsi Banten : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa, dengan tujuan RPD Tahun 2023-2026 adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa dan sasaran daerah adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi yang dijabarkan kedalam prioritas pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah di Provinsi Banten.



3.4. Telaah RTRW Kota Serang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang RTRW Kota Serang Tahun 2020-2040, Rencana struktur ruang wilayah Kota Serang meliputi pusat kegiatan di wilayah yang meliputi:

- a. Pusat Pelayanan meliputi kawasan pusat Kota, yaitu Kecamatan Serang dengan lingkup wilayah pelayanan kecamatan serang dan kecamatan cipocok jaya dengan fungsi primer pemerintahan, pendidikan, perdagangan, jasa, dan fungsi sekunder perumahan serta pariwisata buatan.
- b. Sub Pusat Pelayanan Kota, meliputi:
 - 1) Sub Pusat di Kelurahan Kasemen, yang melayani Kecamatan Kasemen, diarahkan mempunyai fungsi primer sebagai pariwisata religi dan pariwisata lainnya, pertanian berkelanjutan, perdagangan dan jasa, industri, serta fungsi sekunder perumahan;
 - 2) Sub Pusat di Kelurahan Taktakan, yang melayani Kecamatan Taktakan, diarahkan mempunyai fungsi primer sebagai resapan air, agribisnis dan fungsi sekunder perumahan, perdagangan dan jasa dan militer;
 - 3) Sub Pusat di Kelurahan Walantaka, yang melayani Kecamatan Walantaka, diarahkan mempunyai fungsi primer perumahan, perdagangan dan jasa, industri; dan
 - 4) Sub Pusat di Kelurahan Sukajaya, yang melayani Kecamatan Curug, diarahkan mempunyai fungsi primer sebagai pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa, perumahan, dan fungsi sekunder pariwisata buatan.
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan, meliputi:
 - 1) Wilayah Kecamatan Kasemen berada di Kelurahan Kasunyatan;
 - 2) Kecamatan Curug berada di Kelurahan Kemanisan;
 - 3) Kecamatan Walantaka berada di Kelurahan Nyapah;



- 4) Kecamatan Taktakan berada di Kelurahan Cilowong;
- 5) Kecamatan Cipocok Jaya berada di Kelurahan Gelam; dan
- 6) Kecamatan Serang berada di Kelurahan Kaligandu.

Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah tujuan dan sasaran RPD Kota Serang Tahun 2024-2026, telaah Renstra tahun 2023-2026 Provinsi Banten, dan telaah RTRW Kota Serang Tahun 2020-2040. Sekretariat Daerah Kota Serang sebagaimana telah dikaji pada bab-bab sebelumnya maka diperoleh isu-isu strategis sebagai berikut :

Tabel 3.3
Isu-isu strategis OPD

No.	Isu-Isu Strategis
(1)	(2)
1	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan
2	Belum optimalnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
3	Belum optimalnya pengendalian inflasi daerah
4	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang berdampak terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik dan menghambat program reformasi birokrasi.
5	Belum optimalnya terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik terlihat dari Nilai SAKIP yang belum maksimal



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2024- 2026 merupakan penjabaran terhadap capaian Tujuan dan Sasaran Kota Serang Tahun 2024-2026 sebagaimana yang telah tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2024- 2026.

Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2004- 2026 jika di diselaraskan dengan Tujuan dan Sasaran Kota Serang Tahun 2024-2026 tertuang pada table dibawah ini :



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Serang
Tahun 2004-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	Kinerja Tahun Dasar	TARGET KINERJA			Kondisi Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	2026
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tatakelola pemerintahan		Nilai SakipDaerah	Nilai	61.15	62.69	63.65	65.35	65.35
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Persentase	3.40	3.41	3.42	3.43	3.43
			Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Nilai Sakip Kategori BB	Persentase	37.50	46.88	56.25	65.63	65.63
2	Optimalisasi pengendalin inflasi daerah		Laju Inflasi Daerah	Persen	5	4	4	4	4
		Terkendalnya inflasi bahan pokok	Laju Inflasi Bahan Pokok	%	5	4	4	4	4
3	Meningkatnya Akuntabilit as kinerja Setda		Nilai SakipSetda	Nilai	68.40	69.40	70.40	71.40	71.40
		Meningkatnya capaian kinerja utama Setda	Rata-rata tingkat capaianIKU Setda	persen	100	100	100	100	100



4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit kerja yang lebih tinggi ke level unit kerja yang lebih rendah. Rumusan cascading kinerja Perangkat Daerah ini mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing. Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut.



Tabel 4.2
Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Kota Serang

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM KEGIATANDAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan tatakelola pemerintahan	Nilai Sakip. Daerah. (Nilai)			
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD (Persentase)			
	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Nilai Sakip Kategori BB (Persentase)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Dengan Satuan:Point)	Asisten Administrasi Umum
			Nilai Rata-rata Sakip Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	Asisten Administrasi Umum
		Perencanaan penganggaran dan Evaluasi nerja Perangkat Daerah	capaian rata-rata pengukuran kinerja opd (Dengan Satuan: persentase)	Bagian Umum
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Sokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Bagian Umum
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	Bagian Umum
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	Bagian Umum
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan okumen DPA- SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	Bagian Umum



RENCANA STRATGEIS TAHUN 2024-2026

		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	Bagian Umum
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	Bagian Umum
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Laporan)	Bagian Umum
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan S e t d a (D e n g a n Satuan: Persentase)	Bagian Umum
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: Orang/bulan)	Bagian Umum
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	Bagian Umum
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	Bagian Umum
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah yang masih bias di gunakan (Dengan Satuan: Laporan)	Bagian Umum
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	Bagian Umum
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Dengan Satuan: Unit)	-
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan: Paket)	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan: Dokumen)	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG



RENCANA STRATGEIS TAHUN 2024-2026

		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi PeraturanPerundang- Undangan (Dengan Satuan: Orang)	Bagian Protokoldan Komunikasi Pimpinan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan erundang-Undangan (Dengan Satuan: Orang)	Bagian Protokol dan KomunikasiPimpinan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Persentase)	Bagian Umum
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan antor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	Bagian Umum
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	Bagian Umum
		Penyediaan PeralatanRumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan(Dengan Satuan:Paket)	Bagian Umum
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan(Dengan Satuan: Paket)	Bagian Umum
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yangDisediakan (Dengan Satuan:Paket)	Bagian Umum
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan (DenganSatuan: Paket)	Bagian Umum
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (DenganSatuan:Laporan)	Bagian Umum
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	Bagian Umum
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen Administrasi BMD padaPerangkat Daerah (sengan Satuan:Persentase)	Bagian Umum
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Bagian Umum
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Bagian Umum
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan(Dengan Satuan:Unit)	Bagian Umum

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG



RENCANA STRATGEIS TAHUN 2024-2026

		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Bagian Umum
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Bagian Umum
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Bagian Umum
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Ketersediaan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah (Dengan Satuan: Persentase)	Bagian Umum
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan: Laporan)	Bagian Umum
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Bagian Umum
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Bagian Umum
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	Bagian Umum
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Cakupan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Persentase)	Bagian Umum
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan: Unit)	Bagian Umum
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	Bagian Umum
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	Bagian Umum
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi (Dengan Satuan: Unit)	Bagian Umum



RENCANA STRATGEIS TAHUN 2024-2026

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Dengan Satuan: Unit)	Bagian Umum
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Pembayaran Gaji dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan: Presentase)	Bagian Umum
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan: Orang/Bulan)	Bagian Umum
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut pelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	Bagian Umum
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan: Orang)	Bagian Umum
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan: Orang/Bulan)	Bagian Umum
		Penataan Organisasi	Indikator Kegiatan : Tingkat Ketersediaan Dokumen tatakelola organisasi (Dengan Satuan: Presentase)	Bagian Umum
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dengan Satuan: Dokumen)	Bagian Organisasi
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dengan Satuan: Laporan)	-
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan: Dokumen)	-
		Monitoring, Evaluasi dan pengendalian Kualitas pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dengan Satuan: Dokumen)	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	-
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Dengan Satuan: Presentase)	Bagian Umum

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG



RENCANA STRATGEIS TAHUN 2024-2026

		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi peprotokolan (Dengan Satuan: Laporan)	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Dengan Satuan: Laporan)	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentas dan Tugas Pimpinan (Dengan Satuan: Laporan)	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Optimalisasi pengendalin inflasi daerah	Laju Inflasi Daerah (Persen)			
Terkendalinya inflasi bahan pokok	Laju Inflasi Bahan Pokok (%)			
		P R O G R A M PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tingkat Ketercapaian Tertib Administrasi Kewilayahan (Dengan Satuan: Persentase)	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Tingkat Ketercapaian Implementasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Dengan Satuan: Persentase)	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Tingkat Ketercapaian Indeks Reformasi Hukum (Dengan Satuan: Persentase)	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase urusan kewiyahan yang di tangani (Dengan Satuan: dokumen)	Bagian Pemerintahan
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Dengan Satuan: Dokumen)	Bagian Pemerintahan
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dengan atuan: Dokumen)	Bagian Pemerintahan
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	Bagian Pemerintahan
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Fasilitasi Keagamaan dan Kemasyarakatan (Dengan Satuan: Dokumen)	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dengan Satuan: Dokumen)	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dengan Satuan: Dokumen)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG



RENCANA STRATGEIS TAHUN 2024-2026

		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dengan Satuan:Dokumen)	Bagian KesejahteraanRakyat
		Peningkatan KesadaranKeluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok M a s y a r a k a t (D e n g a n Satuan: Keluarga)	Bagian esejahteraan Rakyat
		Peningkatan KesadaranKeluarga dalam Peningkatan pendidikandan keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat danLayak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Dengan Satuan:Keluarga)	Bagian esejahteraan Rakyat
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Presentase Perda Perwal yang di s a h k a n (D e n g a nSatuan: DOKumen)	Bagian Hukum
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerahyang Disusun (Dengan Satuan: Dokumen)	Bagian Hukum
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi BantuanHukum (Dengan Satuan: Kasus)	Bagian Hukum
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan InformasiHukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukumyang Didokumentasi (Dengan Satuan: Dokumen)	Bagian Hukum
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Peresentase Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama (Dengan Satuan: Dokumen)	Bagian Pemerintahan
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri(Dengan Satuan:Dokumen)	Bagian Pemerintahan
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Dengan Satuan:Laporan)	Bagian Pemerintahan
		P R O G R A M PEREKONOMIANDAN PEMBANGUNAN	Tingkat Ketercapaian Capaian pengendalian pertumbuhanPerekonomian (Dengan Satuan: Persentase)	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
			Tingkat ketercapaian Capaian Perencanaan Pengendalian dan evaluasi Pembangunan (Dengan Satuan: Persentase)	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
			Tingkat ketercapaian tata kelola pengadaan barang dan jasa(Dengan Satuan:Persentase)	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Capaian Implementasi Kebijakan Perekonomian (Dengan Satuan: Persentase)	Bagian Perekonomian

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG



RENCANA STRATGEIS TAHUN 2024-2026

	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dengan Satuan: Dokumen)	Bagian Perekonomian
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Dengan Satuan: Laporan)	Bagian Perekonomian
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dengan Satuan: Dokumen)	Bagian Perekonomian
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Capaian implementasi Kebijakan Adminsitrase Pembangunan (Dengan Satuan: Persentase)	Bagian administrasi Pembangunan
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	Bagian Administrasi Pembangunan
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Dengan Satuan: Laporan)	Bagian Administrasi Pembangunan
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Dengan Satuan: Laporan)	Bagian Administrasi Pembangunan
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Presentase Pengendalian Pembangunan (Dengan Satuan: Persentase)	Bagian Pengadaan Barang Jasa
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dengan Satuan: Dokumen)	Bagian Pengadaan Barang Jasa
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik (Dengan Satuan: Dokumen)	Bagian Pengadaan Barang Jasa
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Dengan Satuan: Orang)	Bagian Pengadaan Barang Jasa



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah berisikan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah, sedangkan kebijakan adalah arah dan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, pada ketentuan umum Pasal 1 disebutkan bahwa :

- Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
- Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Sementara strategi perangkat daerah adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah, sementara kebijakan perangkat daerah adalah arah dan tindakan yang diambil oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan asaran perangkat daerah di dalam Rencana



Strategis (Renstra).

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat untuk ketercapaian target kinerja Sekretariat Daerah Kota Serang.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah kota Serang tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



RENCANA STRATGEIS TAHUN 2024-2026

**Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program**

Tujuan Daerah : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik							
Sasaran Daerah : Meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah							
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN			PROGRAM
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	7
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tatakelola pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatkan nilai capaian rata-rata sakip perangkat daerah	Peningkatan Monitoring, koordinasi dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah				Program Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/kota
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Meningkatnya CapaianKinerja Utama Sekretariat Daerah	Peningkatan pemenuhan layanan kesekretariatan	Peningkatan pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, BMD dan kepegawaianperangkat daerah yang berkualitas				Program Penunjang UrusanPemerintahan DaerahKabupaten/Kota
			Peningkatan pemenuhansarana dan prasarana penunjang di Perangkat Daerah				
Tujuan Daerah : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan yang Berkelanjutan							
Sasaran Daerah : Peningkatan Perekonomian Masyarakat yang BERkeadilan							
Optimalisasi pengendalin inflasi daerah	Terkendalnya inflasi bahan pokok	Meningkatkan pengendalian pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Pengendalian Distribusi Perekonomian				Program PemerintahanDan Kesejahteraan Rakyat
							Program Perekonomian Dan Pembangunan



BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam melaksanakan urusan pendukung urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kota Serang telah menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan prioritas guna ketercapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Serang. Pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan prediksi kebutuhan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam ketentuan umum disebutkan bahwa :

- Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
- Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Serang yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2024-2026 diuraikan sebagai berikut :



1. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

A. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

- 1) Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

B. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
- 2) Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

C. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
- 3) Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

D Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
- 4) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
- 5). Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

2. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

A. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
- 2) Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
- 3) Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

B. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

- 1). Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan



- 2) Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

C, Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
- 3) Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD



C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- 2) SubKegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 3) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 4) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan

E. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

F. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
- 8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

G. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- 3) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

H. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

I. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- 3) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

H. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

I. Kegiatan Penataan Organisasi

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- 3) Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- 4) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

J. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
- 3) Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai penyusunan rencana kerja pada tiap tahun dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Serang tahun 2024-2026. Rumusan target kinerja disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kota Serang untuk 3 (tiga) tahun kedepan perlu menyesuaikan dengan proyeksi kapasitas rill keuangan daerah yang sudah di perhitungkan untuk kebutuhan selama 3 (tiga) tahun sebagaimana dapat dilihat pada tabel 6.1 :



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tatakelola pemerintahan				Nilai Sakip Daerah. (Nilai)	61.15	62.69		63.65		65.35		65.35			
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			Nilai LPPD (Persentase)	3.40	3.41		3.42		3.43		3.43			
				Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Nilai Sakip Kategori BB (Persentase)	37.50	46.88		56.25		65.63		65.63			
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan Pelayananan Kesekretariatan (Dengan Satuan:Point)	100%	100%	37.645.810.494	100%	39.861.584.536	100%	40.509.571.466	100%	118.016.966.496	Asisten AdministrasiUmum	
				Nilai Rata-rata Sakip PerangkatDaerah (Dengan Satuan:Nilai)	67,63	68,56		72,35		75,55		75,55		Asisten AdministrasiUmum	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		capaian rata-rata pengukuran kinerja opd (Dengan Satuan:Persentase)	100%	100%	431.144.609	100%	783.044.614	100%	861.421.127	100%	2.075.610.350	Bagian Umum	
	4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	3 Dokumen	3 Dokumen	231.605.000	2 Dokumen	381.605.000	2 Dokumen	395.272.206	7 Dokumen	1.008.482.206	Bagian Umum	Kota Serang
	4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	25.029.125	1 Dokumen	28.029.125	1 Dokumen	31.118.780	3 Dokumen	84.177.030	Bagian Umum	Kota Serang
	4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	25.029.125	1 Dokumen	25.029.125	1 Dokumen	31.118.780	3 Dokumen	81.177.030	Bagian Umum	Kota Serang



RENCANA STRATGEIS TAHUN 2024-2026

	4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	7.951.800	1 Dokumen	19.851.800	1 Dokumen	19.851.800	3 Dokumen	47.655.400	Bagian Umum	K o t a Serang
	4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	7.351.800	1 Dokumen	19.351.800	1 Dokumen	19.351.800	3 Dokumen	46.055.400	Bagian Umum	K o t a Serang
	4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	3 Laporan	4 Laporan	117.526.646	4 Laporan	267.526.646	4 Laporan	342.526.646	12 Laporan	727.579.938	Bagian Umum	K o t a Serang
	4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	16.651.113	1 Laporan	41.651.118	1 Laporan	22.181.115	3 Laporan	80.483.346	Bagian Umum	K o t a Serang
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan Setda (Dengan Satuan: Persentase)	100%	100%	20.022.521.578	100%	20.628.912.589	100%	22.160.719.746	100%	62.812.153.913	Bagian Umum	
	4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	73 Orang/Bulan	73 Orang/Bulan	19.399.039.590	76 Orang/Bulan	19.730.430.601	80 Orang/Bulan	21.167.818.260	229 Orang/Bulan	60.297.288.451	Bagian Umum	K o t a Serang
	4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1 laporan	1 laporan	103.745.400	1 laporan	128.745.400	1 laporan	216.194.848	3 laporan	448.685.648	Bagian Umum	K o t a Serang
	4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	9 laporan	3 laporan	519.736.588	3 laporan	769.736.588	3 laporan	776.706.638	9 laporan	2.066.179.814	Bagian Umum	K o t a Serang
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah yang masih bisa di gunakan (Dengan Satuan:Laporan)	100%	100%	51.806.610	100%	94.829.556	100%	104.411.301	100%	251.047.467	Bagian Umum	
	4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	6 Dokumen	6 Dokumen	51.806.610	6 Dokumen	94.829.556	6 Dokumen	104.411.301	18 Dokumen	251.047.467	Bagian Umum	K o t a Serang
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				494.184.200		797.299.350		744.230.400		2.035.713.950	-	



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

4.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Dengan Satuan:Unit)	0 Unit	1 Unit	4.659.750	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	4.659.750	-	K o t a Serang
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)		26 paket	105.844.450	28 Paket	317.171.350	70 Paket	267.200.000	76 Paket	690.215.800	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	K o t a Serang
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	5 Dokumen	1 Dokumen	83.930.000	1 Dokumen	105.028.000	1 Dokumen	104.350.400	3 Dokumne	293.308.400	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	K o t a Serang
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	300 Orang	70 Orang	190.750.000	70 Orang	238.700.000	70 Orang	237.160.000	210 Orang	666.610.000	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	K o t a Serang
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	0 Orang	22 orang	109.000.000	20 Orang	136.400.000	15 Orang	135.520.000	57 Orang	380.920.000	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	K o t a Serang
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100%	100%	3.626.176.533	100%	4.314.568.590	100%	3.777.899.729	100%	11.718.644.852	Bagian Umum	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12 Paket	12 Paket	31.882.500	12 Paket	49.394.800	12 Paket	36.921.080	36 Paket	118.198.380	Bagian Umum	K o t a Serang
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12 Paket	12 Paket	124.876.648	12 Paket	156.267.659	12 Paket	155.259.480	36 Paket	436.403.787	Bagian Umum	K o t a Serang
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12 Paket	12 Paket	29.103.000	12 Paket	36.394.000	12 Paket	34.188.000	36 Paket	99.685.000	Bagian Umum	K o t a Serang
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	12 Paket	12 Paket	2.012.075.000	12 Paket	2.198.986.000	12 Paket	1.921.224.080	36 Paket	6.132.285.080	Bagian Umum	K o t a Serang
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12 Paket	12 Paket	102.556.933	12 Paket	129.577.299	12 Paket	127.509.316	36 Paket	359.643.548	Bagian Umum	K o t a Serang
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12 Paket	12 Paket	67.580.000	12 Paket	79.639.310	12 Paket	73.763.200	36 Paket	220.982.510	Bagian Umum	K o t a Serang
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	12 Laporan	150 Laporan	198.925.000	165 Laporan	257.455.000	175 Laporan	245.196.560	490 Laporan	701.576.560	Bagian Umum	K o t a Serang



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	1.059.177.452	12 Laporan	1.406.854.522	12 Laporan	1.183.838.013	36 Laporan	3.649.869.987	Bagian Umum	Kota Serang
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen Administrasi BMD pada Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Persentase)	100%	100%	2.858.807.086	100%	2.696.174.160	100%	2.540.938.456	100%	8.095.919.702	Bagian Umum	
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	4 Unit	6 Unit	1.400.000.000	8 Unit	1.207.089.160	7 Unit	922.274.416	21 Unit	3.529.363.576	Bagian Umum	Kota Serang
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3 Unit	5 Unit	118.810.000	4 Unit	127.255.000	6 Unit	137.564.000	15 Unit	383.629.000	Bagian Umum	Kota Serang
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	5	35	210.179.386	25	195.765.000	30	19.317.620	90	425.262.006	Bagian Umum	Kota Serang
4.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	2	299.750.000	3	496.000.000	3	448.000.000	8	1.243.750.000	Bagian Umum	Kota Serang
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	15	595.412.500	10	542.500.000	13	624.540.420	38	1.762.452.920	Bagian Umum	Kota Serang
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	3	234.655.200	2	127.565.000	11	389.242.000	11	751.462.200	Bagian Umum	Kota Serang
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah (Dengan Satuan: Persentase)	100%	100%	2.365.057.562	100%	2.744.380.058	100%	2.835.408.880	100%	7.944.846.500	Bagian Umum	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12 Laporan	12Laporan	14.742.250	12 Laporan	18.454.920	12 Laporan	18.335.520	36Laporan	51.532.690	Bagian Umum	Kota Serang
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	577.450.390	12 Laporan	722.608.264	12 Laporan	717.945.659	36 Laporan	2.018.004.313	Bagian Umum	Kota Serang
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	1.253.995.120	12 Laporan	1.353.995.120	12 Laporan	1.453.995.120	36 Laporan	4.061.985.360	Bagian Umum	Kota Serang
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	518.869.802	12 Laporan	649.321.754	12 Laporan	645.132.581	36 Laporan	1.813.324.137	Bagian Umum	Kota Serang



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Cakupan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Presentase)	100%	100%	3.565.265.583	100%	3.586.898.400	100%	3.281.559.400	100%	10.433.723.383	Bagian Umum	
	4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	95 Unit	90 Unit	2.463.490.313	95 Unit	2.288.110.000	96 Unit	2.059.421.000	280 Unit	6.811.021.313	Bagian Umum	Kota Serang
	4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	200 Unit	500 Unit	24.525.000	550 Unit	31.000.000	600 Unit	36.400.000	1070 Unit	91.925.000	Bagian Umum	Kota Serang
	4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	85 Unit	100 Unit	182.874.750	150 Unit	214.166.600	200 Unit	197.932.000	450 Unit	594.973.350	Bagian Umum	Kota Serang
	4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	2	467.926.100	2	548.098.600	2	509.863.200	6	1.525.887.900	Bagian Umum	Kota Serang
	4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2 Unit	2 Unit	426.449.420	2 Unit	505.523.200	2 Unit	477.943.200	6 Unit	1.409.915.820	Bagian Umum	Kota Serang
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Pembayaran Gaji dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Presentase)	100%	100%	876.880.396	100%	883.880.396	100%	892.880.396	100%	2.653.641.188	Bagian Umum	
	4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Orang/Bulan)	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	177.880.396	2 Orang/Bulan	177.880.396	2 Orang/Bulan	177.880.396	6 Orang/Bulan	533.641.188	Bagian Umum	Kota Serang
	4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2 Paket	2 Paket	54.000.000	2 Paket	56.000.000	2 Paket	60.000.000	6 Paket	170.000.000	Bagian Umum	Kota Serang
	4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Orang)	4 Orang	4 Orang	45.000.000	4 Orang	50.000.000	4 Orang	55.000.000	12 Orang	150.000.000	Bagian Umum	Kota Serang
	4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Orang/Bulan)	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	600.000.000	2 Orang/Bulan	600.000.000	2 Orang/Bulan	600.000.000	6 Orang/Bulan	1.800.000.000	Bagian Umum	Kota Serang
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Indikator Kegiatan : Tingkat Ketersediaan Dokumen tata kelola organisasi (Dengan Satuan:Presentase)	100%	100%	949.508.412	100%	1.056.841.931	100%	1.050.023.594	100%	3.056.373.937	Bagian Umum	



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

	4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dengan Satuan:Dokumen)	5 Dokumen	3 Dokumen	373.778.075	4 Dokumen	421.349.830	4 Dokumen	418.631.444	11 Dokumen	1.213.759.349	Bagian Organisasi	K o t a Serang
	4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dengan Satuan:Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	123.195.247	1 Laporan	154.163.593	1 Laporan	153.168.989	3 Laporan	430.527.829	-	K o t a Serang
	4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan:Dokumen)	1 Dokumen	1 Doumen	153.369.486	1 Doumen	191.922.916	1 Doumen	190.684.703	3 Doumen	535.977.105	-	K o t a Serang
	4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dengan Satuan:Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	126.564.120	1 Dokumen	122.435.078	1 Dokumen	121.645.174	3 Dokumen	370.644.372	-	K o t a Serang
	4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1 Dokumen	3 Dokumen	172.601.484	3 Dokumen	166.970.514	3 Dokumen	165.893.284	9 Dokumen	505.465.282	-	K o t a Serang
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Dengan Satuan:Presentase)		100%	2.404.457.925	100%	2.274.754.892	100%	2.260.078.437	100%	6.939.291.254	Bagian Umum	
	4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Dengan Satuan:Laporan)	12 Laporan	36 Laporan	394.158.050	12 Laporan	413.562.754	12 Laporan	410.894.607	12 Laporan	1.218.615.411	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	K o t a Serang
	4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Dengan Satuan:Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	1.311.326.900	12 Laporan	1.180.192.754	12 Laporan	1.172.577.991	36 Laporan	3.664.097.645	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	K o t a Serang
	4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Dengan Satuan:Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	698.972.975	12 Laporan	680.999.384	12 Laporan	676.605.839	36 Laporan	2.056.578.198	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	K o t a Serang
	Optimalisasi pengendalin inflasi daerah		Laju Inflasi Daerah (Persen)	5	4		4		4		4			
	Terkendalnya inflasi bahan pokok		Laju Inflasi Bahan Pokok (%)	5	4		4		4		4			



RENCANA STRATGEIS TAHUN 2024-2026

	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tingkat Ketercapaian Tertib Administrasi Kewilayahan (Dengan Satuan:Persentase)	100%	100%	14.929.391.895	100%	15.195.704.424	100%	15.413.455.256	100%	45.538.551.575	Asisten dan Pemerintahan Rakyat Kesejahteraan	
			Tingkat Ketercapaian implementasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Dengan Satuan:Persentase)	100%	100%		100%		100%		100%		Asisten dan Pemerintahan Rakyat Kesejahteraan	
			Tingkat Ketercapaian Indeks Reformasi Hukum (Dengan Satuan:Persentase)	100%	100%		100%		100%		100%		Asisten dan Pemerintahan Rakyat Kesejahteraan	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase urusan kewiyahan yang di tangani (Dengan Satuan:Dokumen)	40 Dokumen	8 Dokumen	2.099.841.818	8 Dokumen	2.502.554.349	8 Dokumen	2.434.806.445	24 Dokumen	7.037.202.612	Bagian Pemerintahan	
	4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dengan Satuan:Dokumen)	20 Dokumen	4 Dokumen	854.027.624	4 Dokumen	1.006.140.990	4 Dokumen	999.649.758	12 Dokumen	2.859.818.372	Bagian Pemerintahan	K o t a Serang
	4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dengan Satuan:Dokumen)	30 Dokumen	6 Dokumen	994.215.288	6 Dokumen	1.244.137.296	6 Dokumen	1.184.508.212	18 Dokumen	3.422.860.796	Bagian Pemerintahan	K o t a Serang
	4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5 Dokumen	1 Dokumen	251.598.906	1 Dokumen	252.276.063	1 Dokumen	250.648.475	3 Dokumen	754.523.444	Bagian Pemerintahan	K o t a Serang
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Fasilitasi Keagamaan dan Kemasyarakatan (Dengan Satuan:Dokumen)	20 Dokumen	4 Dokumen	10.719.750.000	4 Dokumen	10.583.349.998	4 Dokumen	11.009.009.999	16 Dokumen	32.312.109.997	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
	4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dengan Satuan:Dokumen)	40 Dokumen	8 Dokumen	9.984.000.000	8 Dokumen	9.984.000.000	8 Dokumen	9.953.280.000	25 Dokumen	29.921.280.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat	K o t a Serang
	4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian P e n d u k dan KB (D e n g a n Satuan:Dokumen)	30 Dokumen	1 Dokumen	163.500.000	1 Dokumen	163.500.000	1 Dokumen	262.500.000	3 Dokumen	589.500.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat	K o t a Serang
	4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dengan Satuan:Dokumen)	10 Dokumen	1 Dokumen	136.250.000	1 Dokumen	136.250.000	1 Dokumen	218.750.000	3 Dokumen	491.250.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat	K o t a Serang
	4.01.02.2.02.04	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Dengan Satuan:Keluarga)	100 Dokumen	100 Dokumen	327.000.000	100 Dokumen	190.599.998	100 Dokumen	399.479.999	300 Dokumen	917.079.997	Bagian Kesejahteraan Rakyat	K o t a Serang



RENCANA STRATGEIS TAHUN 2024-2026

	4.01.02.2.02.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Dengan Satuan:Keluarga)	0 Keluarga	50 Keluarga	109.000.000	50 Keluarga	109.000.000	50 Keluarga	175.000.000	150 Keluarga	393.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat	K o t a Serang
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Presentase Perda Perwal yang di sah kan (D e n g a n Satuan:DOKumen)	20 Dokumen	6 Dokumen	1.736.774.140	Dokumen	1.736.774.140	100%	1.555.545.799	16 Dokumen	5.029.094.079	Bagian Hukum	
	4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	150 Dokumen	162 Dokumen	780.546.926	162 Dokumen	780.546.926	162 Dokumen	641.480.416	486 Dokumen	2.202.574.268	Bagian Hukum	K o t a Serang
	4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Dengan Satuan:Kasus)	8	10	583.806.219	10	583.806.219	10	493.722.247	30	1.661.334.685	Bagian Hukum	K o t a Serang
	4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dengan Satuan:Dokumen)	15	9	372.420.995	2	372.420.995	2	420.343.136	13	1.165.185.126	Bagian Hukum	K o t a Serang
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Peresentase Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama (Dengan Satuan:Dokumen)	5 Dokumen	1 Dokumen	373.025.937	1 Dokumen	373.025.937	1 Dokumen	414.093.013	3 Dkumen	1.160.144.887	Bagian Pemerintahan	
	4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dengan Satuan:Dokumen)	10	2	168.323.632	2	168.323.632	2	186.854.674	6	523.501.938	Bagian Pemerintahan	K o t a Serang
	4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Dengan Satuan:Laporan)	10	2	204.702.305	2	204.702.305	2	227.238.339	6	636.642.949	Bagian Pemerintahan	K o t a Serang
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Ketercapaian Capaian pengendalian pertumbuhan perekonomian (Dengan Satuan:Persentase)	100%	100%	3.047.242.332	100%	3.065.155.761	100%	3.199.417.999	100%	9.311.816.092	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
			Tingkat ketercapaian Capaian Perencanaan Pengendalian dan evaluasi Pembangunan (Dengan Satuan:Persentase)	100%	100%		100%		100%		100%		Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
			Tingkat ketercapaian tata kelola pengadaan barang dan jasa (Dengan Satuan:Persentase)	100%	100%		100%		100%		100%		Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Capaian Implementasi Kebijakan Perekonomian (Dengan Satuan:Persentase)	100%	100%	846.859.969	100%	846.859.969	100%	886.500.689	100%	2.580.220.627	Bagian Perekonomian	
	4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dengan Satuan:Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	394.266.851	1 Dokumen	394.266.851	1 Dokumen	394.266.851	3 Dokumen	1.182.800.553	Bagian Perekonomian	K o t a Serang
	4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Dengan Satuan:Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	208.311.680	2 Laporan	208.311.680	1 Laporan	208.311.680	3 Laporan	624.935.040	Bagian Perekonomian	K o t a Serang



RENCANA STRATGEIS TAHUN 2024-2026

4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dengan Satuan:Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	244.281.438	1 Dokumen	244.281.438	1 Dokumen	283.922.158	3 Dokumen	772.485.034	Bagian Perekonomian	K o t a Serang
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Capaian Implementasi Kebijakan Admsitrasi Pembangunan (Dengan Satuan:Persentase)	100%	100%	936.031.163	100%	953.944.591	100%	1.018.566.109	100%	2.908.541.863	Bagian Administrasi Pembangunan	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5 Dokumen	2 Dokumen	178.116.960	2 Dokumen	189.335.203	2 Dokumen	189.335.203	6 Dokumen	556.787.366	Bagian Administrasi Pembangunan	K o t a Serang
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Dengan Satuan:Laporan)	5 Laporan	4 Laporan	180.038.460	4 Laporan	191.355.163	4 Laporan	201.355.163	12 Laporan	572.748.786	Bagian Administrasi Pembangunan	K o t a Serang
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Dengan Satuan: Laporan)	60 Laporan	12 Laporan	577.875.743	12 Laporan	573.254.225	12 Laporan	627.875.743	36 Laporan	1.779.005.711	Bagian Administrasi Pembangunan	K o t a Serang
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Presentase Pengendalian Pembangunan (Dengan Satuan: Persentase)	100%	100%	1.264.351.200	100%	1.264.351.201	100%	1.294.351.201	100%	3.823.053.602	Bagian Pengadaan Barang Jasa	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dengan Satuan:Dokumen)	50 Dokumen	10 Dokumen	339.912.470	10 Dokumen	339.912.471	10 Dokumen	349.912.471	30 Dokumen	1.029.737.412	Bagian Pengadaan Barang Jasa	K o t a Serang
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	15 Dokumen	3 Dokumen	490.412.800	4 Dokumen	490.412.800	4 Dokumen	510.412.800	11 Dokumen	1.491.238.400	Bagian Pengadaan Barang Jasa	K o t a Serang
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Dengan Satuan:Orang)	500 Orang	100 Orang	434.025.930	100 Orang	434.025.930	100 Orang	434.025.930	300 Orang	1.302.077.790	Bagian Pengadaan Barang Jasa	K o t a Serang
TOTAL:					55.622.444.721		58.122.444.721		59.122.444.721		172.867.334.163		



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Serang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Serang tahun 2024-2026 untuk menunjukkan target kinerja yang akan dicapai pada tiga tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Serang Tahun 2024-2026.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), pelaksanaan dan setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan public yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu diketahui kinerjanya, kinerja perangkat daerah yang mengacu pada penyelenggaraan bidang urusan adalah kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian kondisi kinerja akhir priode Renstra perangkat daerah. Kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukurannya setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan.



RENCANA STRATGEIS TAHUN 2024-2026

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Serang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Serang
Tahun 2024-2026 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
Kota Serang Tahun 2024-2026

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	Kinerja Tahun Dasar	TARGET KINERJA			Kondisi Akhir Renstra
			2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tatakelola pemerintahan	Nilai Sakip Daerah	Nilai	61.15	62.69	63.65	65.35	65.35
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Persentase	3.40	3.41	3.42	3.43	3.43
	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Nilai Sakip Kategori BB	Persentase	37.50	46.88	56.25	65.63	65.63
Optimalisasi pengendalian inflasi daerah	Laju Inflasi Daerah	Persen	5	4	4	4	4
Terkendalinya inflasi bahan pokok	Laju Inflasi Bahan Pokok	%	5	4	4	4	4
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda	Nilai Sakip Setda	Nilai	68.40	69.40	70.40	71.40	71.40
Meningkatnya capaian kinerja utama Setda	Rata-rata tingkat capaian IKU Setda	persen	100	100	100	100	100

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah Kota Serang
Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator	SATUAN	Kinerja Awal Periode Renstra (2023)	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun			Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	93	92	93	94	94
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	91	93	94	95	95



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk melakukan aktifitas organisasinya dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan strategis. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk dapat lebih menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pencapaian target kinerja. Keberhasilan implementasinya pada dasarnya sangat mengutamakan kesungguhan dan komitmen pemangku kepentingan lingkup Sekretariat Daerah Kota Serang. Dukungan masyarakat yang merupakan mitra strategis, serta semua pihak yang terlibat dalam sinkronisasi dalam mewujudkan ketercapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2024-2026.

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tiga tahun yang digunakan sebagai pedoman dan acuan bersama bagi unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Serang maupun stakeholders yang terkait. Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat

Daerah Kota Serang tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kota Serang dan bagian-bagian pada Sekretariat Daerah Kota Serang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat Daerah Kota Serang dan bidang-bidang pada Sekretariat Daerah Kota Serang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Serang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.



4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Serang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Renstra PD disesuaikan dengan kebutuhan dan Isu Strategis sebagai bahan koordinasi baik dengan Pemerintahan Pusat, Pemerintah Propinsi Banten maupun Instansi terkait sehingga terjalin sinergitas dalam pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi guna pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Kota Serang Tahun 2024-2026 yang lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Implementasi Renstra PD ini diharap dapat berkesinambungan terhadap Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang belum dapat diselesaikan dalam waktu sebelumnya, sehingga hasil yang diharapkan dari Renstra PD ini dapat optimal dalam ketercapaian target unsur pendukung urusan pemerintahan.



SEKRETARIS DAERAH KOTASERANG

Dis. H. NANANG SAEFUDIN, M.Si
NIP.19670802 198603 1 003